



**LAPORAN
KEUANGAN
TA 2018
AUDITED**

**KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN**

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Laporan Keuangan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018
Audited



Jalan Purnawarman Nomor 99, Kebayoran Baru
Jakarta

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna bagi para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2019

Kepala BPPK,


Rionald Silaban
NIP 19660423 199010 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	45
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	67
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	74
VI. Lampiran	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12110, PO BOX 4807
TELEPON (021)-7394666 FAKSMILE (021) 72444912

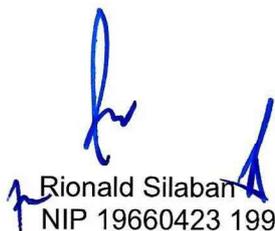
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2019

Kepala BPPK,


Rionald Silaban
NIP 19660423 199010 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp50.746.902.639 atau mencapai 250,05 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp20.294.464.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp 683.318.210.691 atau mencapai 88,25 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 774.327.499.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.865.418.800.769 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp105.121.965.318; Aset Tetap (neto) sebesar Rp6.753.093.169.906; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp1.432.800; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 7.202.232.745.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.131.944.319 dan Rp6.864.286.856.450.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp46.116.194.604, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp651.963.009.045 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(605.846.814.441). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp576.447.163 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(605.270.367.278).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp6.822.257.127.238 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(605.270.367.278) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.684.661.468 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp645.615.435.022 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp6.864.286.856.450.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018		% thd Angg	31 Desember 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	20.294.464.000	50.746.902.639	250,05	49.684.081.117
JUMLAH PENDAPATAN		20.294.464.000	50.746.902.639	250,05	49.684.081.117
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	85.672.834.000	83.193.012.885	97,11	78.720.372.595
Belanja Barang	B.4	582.544.220.000	498.280.184.551	85,54	485.787.347.824
Jumlah Belanja Operasi		668.217.054.000	581.473.197.436	87,02	564.507.720.419
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.5	-	-	0,00	1.854.000
Belanja Peralatan dan Mesin	B.6	43.156.967.000	41.125.873.761	95,29	61.500.044.908
Belanja Gedung dan Bangunan	B.7	62.695.438.000	60.623.244.488	96,69	17.246.278.494
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.8	65.230.000	64.955.000	99,58	384.577.600
Belanja Modal Lainnya	B.9	192.810.000	30.940.006	16,05	894.482.979
Belanja Modal blu		-	-	0,00	5.590.173.540
Jumlah Belanja Modal		106.110.445.000	101.845.013.255	95,98	85.617.411.521
JUMLAH BELANJA		774.327.499.000	683.318.210.691	88,25	650.125.131.940

II. NERACA

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% KENAIKAN (PENURUNAN)
ASET				
Aset Lancar				
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1	Rp 18.800.000	Rp 10.000.000	88,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	Rp -	Rp 1.865.808.583	-100,00
Kas pada Badan Layanan Umum	C.3	Rp 99.424.806.073	Rp 86.380.679.103	15,10
Uang Muka Belanja (Prepayment)	C.4	Rp 267.500	Rp 2.325.422	-88,50
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.5	Rp 33.604.557	Rp 215.013.699	-84,37
Piutang Bukan Pajak		Rp 1.798.266.387	Rp 2.514.327.607	-28,48
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		Rp (901.423.177)	Rp (914.048.938)	-1,38
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.6	Rp 896.843.210	Rp 1.600.278.669	-43,96
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		Rp 8.760.000	Rp -	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		Rp (43.800)	Rp -	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.7	Rp 8.716.200	Rp -	0,00
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum		Rp 290.350.000	Rp 290.350.000	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU		Rp (290.350.000)	Rp (145.175.000)	100,00
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	C.8	Rp -	Rp 145.175.000	-100,00
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum		Rp 467.335.113	Rp 467.335.113	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU		Rp (467.335.113)	Rp (467.335.113)	0,00
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	C.9	Rp -	Rp -	0,00
Persediaan	C.11	Rp 4.738.927.778	Rp 3.909.185.171	21,23
Jumlah Aset Lancar		Rp 105.121.965.318	Rp 94.128.465.647	11,68
Aset Tetap				
Tanah	C.12	Rp 5.702.028.221.000	Rp 5.702.028.221.000	0,00
Peralatan dan Mesin	C.13	Rp 349.987.715.606	Rp 320.598.980.382	9,17
Gedung dan Bangunan	C.14	Rp 914.120.177.720	Rp 900.253.028.051	1,54
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.15	Rp 38.318.120.157	Rp 36.419.374.778	5,21
Aset Tetap Lainnya	C.16	Rp 15.767.499.956	Rp 16.280.591.524	-3,15
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.17	Rp 52.066.821.704	Rp 5.550.698.300	838,02
Akumulasi Penyusutan	C.18	Rp (319.195.386.237)	Rp (258.973.096.145)	23,25
Jumlah Aset Tetap		Rp 6.753.093.169.906	Rp 6.722.157.797.890	0,46

Lanjut

Lanjutan ...

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% KENAIKAN (PENURUNAN)
Piutang Jangka Panjang				
Piutang Tagihan TP/TGR	C.19	Rp 1.453.618.819	Rp 1.351.942.144	7,52
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP/TGR	C.20	Rp (1.452.186.019)	Rp (1.310.092.144)	10,85
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		Rp 1.432.800	Rp 41.850.000	-96,58
Jumlah Piutang Jangka Panjang		Rp 1.432.800	Rp 41.850.000	-96,58
Aset Lainnya				
Aset Tak Berwujud	C.21	Rp 9.618.637.434	Rp 9.613.161.972	0,06
Aset Lain-Lain	C.22	Rp 13.847.710.817	Rp 14.836.529.031	-6,66
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.23	Rp (16.264.115.506)	Rp (15.648.180.922)	3,94
Jumlah Aset Lainnya		Rp 7.202.232.745	Rp 8.801.510.081	-18,17
JUMLAH ASET		Rp 6.865.418.800.769	Rp 6.825.129.623.618	0,59
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Uang Muka dari KPPN	C.25	Rp -	Rp -	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.24	Rp 991.859.956,00	Rp 2.850.274.811	-65,20
Pendapatan Diterima Dimuka	C.26	Rp 140.084.363	Rp 22.221.569	530,40
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.29	Rp -	Rp -	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.28	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp 1.131.944.319	Rp 2.872.496.380	-60,59
JUMLAH KEWAJIBAN		Rp 1.131.944.319	Rp 2.872.496.380	-60,59
EKUITAS DANA	C.30	Rp 6.864.286.856.450	Rp 6.822.257.127.238	0,62
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		Rp 6.865.418.800.769	Rp 6.825.129.623.618	0,59

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	46.116.194.604	47.637.372.009
JUMLAH PENDAPATAN		46.116.194.604	47.637.372.009
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	84.620.218.457	80.661.681.578
Beban Persediaan	D.3	27.913.177.233	15.244.431.653
Beban Barang dan Jasa	D.4	364.073.888.267	392.050.969.497
Beban Pemeliharaan	D.5	20.357.799.687	15.775.340.892
Beban Perjalanan Dinas	D.6	84.788.853.808	61.228.673.878
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	69.934.384.679	60.593.467.337
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	274.686.914	127.787.333
Beban Lain-lain		-	-
JUMLAH BEBAN		651.963.009.045	625.682.352.168
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(605.846.814.441)	(578.044.980.159)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	468.115.496
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(2.392.228.077)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4.630.963.028	955.744.192
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.662.287.788	546.569.525
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		576.447.163	877.290.163
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(605.270.367.278)	(577.167.689.996)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(605.270.367.278)	(577.167.689.996)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Ekuitas Awal	E.1	6.822.257.127.238	2.144.570.112.820
Surplus/Defisit LO	E.2	(605.270.367.278)	(577.167.689.996)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	E.3	-	-
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4	1.684.661.468	4.643.784.630.716
- Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
- Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	-	4.642.496.469.899
- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	1.722.228.916	1.228.163.490
- Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi		-	-
- Koreksi Lainnya	E.4.5	(37.567.448)	59.997.327
Transaksi Antar Entitas	E.5	645.615.435.022	611.070.073.698
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		42.029.729.212	4.677.687.014.418
Ekuitas Akhir	E.6	6.864.286.856.450	6.822.257.127.238

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berkewajiban memberikan layanan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi di bidang keuangan negara, khususnya bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan guna mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan yaitu **"Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21"**. Salah satu kunci penting bagi pemenuhan tingkat kepuasan atas layanan yang diberikan kepada unit pengguna, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan adalah komitmen yang kuat dari seluruh jajaran BPPK.

Dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan diperlukan sumber daya manusia yang andal dan berkualitas. Perubahan paradigma saat ini, di mana sumber daya manusia adalah aset atau modal yang berharga dan perlu dikembangkan. BPPK tidak hanya sekedar menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, BPPK harus menjadi contoh pendidikan dan pelatihan yang mengembangkan modal manusia atau *human capital* tidak hanya di Kementerian Keuangan tetapi juga pengembangan modal sumber daya manusia pengelola keuangan negara bagi Republik Indonesia. BPPK diharapkan dapat mengembangkan sumber daya manusia Kementerian Keuangan sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan dan menghadapi tantangan yang ada. Hal ini perlu dikembangkan dalam rangka BPPK menuju *Corporate University*.

BPPK memiliki tugas untuk memastikan sumber daya manusia Kementerian Keuangan memiliki kompetensi yang memadai dan andal sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja dari seluruh mitra BPPK, terutama di seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-1162/PP/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2015-2019, visi dan misi

BPPK adalah sebagai berikut:

Visi

Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka dalam menghasilkan pengelola keuangan negara berkelas dunia.

Misi

1. Membangun sistem pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan Negara yang terintegrasi dalam mewujudkan *corporate university*.
2. Mengelola dan mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan Negara yang berkualitas.
3. Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir dan efektif dalam mendukung pembelajaran.
4. Mengembangkan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan Negara yang berkualitas.
5. Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik.

Tugas, Fungsi dan Peran

BPPK yang beralamat di Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Bab XIII mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, BPPK menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara;
2. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan, entitas pelaporan pemerintah pusat menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak

Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Laporan Keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPPK. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Modul Pelaporan dan Modul Aset. SAKTI Modul Pelaporan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SAKTI Modul Aset menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca, laporan barang milik negara, dan laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun

2018 ini merupakan laporan gabungan dari seluruh jenjang struktural di bawah BPPK yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi dalam lingkup BPPK adalah 20 (dua puluh) entitas. Rincian entitas akuntansi tersebut tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
			KP		KD		DK		TP			
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
1	0199	Satker BPPK pusat	7									7
2	0200	Prop Jawa Barat			2							2
3	0300	Prop Jawa Tengah			1							1
4	0400	Prop DI Yogyakarta			1							1
5	0500	Prop Jawa Timur			1							1
6	0700	Prop Sumatra Utara			1							1
7	1100	Prop Sumatra Selatan			1							1
8	1600	Prop Kalimantan Timur			1							1
9	1700	Prop Sulawesi Utara			1							1
10	1900	Prop Sulawesi Selatan			1							1
11	2200	Prop. Bali			1							1
12	1351	Prop. Kalimantan Barat			1							1
13	0900	Prop. Riau			1							1
Jumlah			7		13							20

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BPPK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa

lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Berbasis AkruaL Lingkup Kementerian Keuangan BA 015 sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

- Pendapatan yang berasal dari BLU PKN STAN, diantaranya :
Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan, Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha, Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah, Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang diakui setelah pengesahan BLU.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- Semua pendapatan-LO di Kementerian Keuangan yang belum diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrual Lingkup Kementerian Keuangan BA 015 mengikuti kebijakan akuntansi pendapatan-LO secara umum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi

jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan di neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk

penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Ketentuan mengenai perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Ketentuan Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat aset tetap dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud diakui jika dan hanya jika:

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- Untuk keseragaman penyajian dan pengungkapan ATB di seluruh satuan kerja di Pemerintah Pusat, tata cara penyajian dan pengungkapan ATB (sesuai Bultek SAP No.17) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(7) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(8) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(9) Amortisasi Aset Tak Berwujud

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.06/2015, amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi:
 - a. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;
 - b. Lisensi;
 - c. Waralaba (*Franchise*);
 - d. Hak Cipta (*Copyright*); dan
 - e. Hak Paten.
- Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*Copyright*) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.
- Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 30 September 2016 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 30 September 2016. Untuk

Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 30 September 2016, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu.

- Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan **mulai Tahun Anggaran 2016**.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015, masa manfaat Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kode Barang					Uraian	Tahun
8	01	01	01	001	Software Komputer	4
8	01	01	01	002	Lisensi	10
8	01	01	01	003	Franchise	5
8	01	01	01	004	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
8	01	01	01	005	Hak Paten Sederhana	10
8	01	01	01	008	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
8	01	01	01	009	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	01	01	01	010	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
8	01	01	01	011	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
8	01	01	01	012	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
8	01	01	01	013	Paten Biasa	20
8	01	01	01	014	Merek	10
8	01	01	01	015	Desain Industri	10
8	01	01	01	016	Rahasia Dagang	10
8	01	01	01	017	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10

8	01	01	01	018	Perlindungan Varietas Tanaman Musiman	20
8	01	01	01	019	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama Kali*

(10) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 September 2016 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPPK telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja BPPK Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Tabel 5:

Tabel 5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja BPPK TA 2018

Uraian	2018	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Direvisi (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	20.294.464.000	20.294.464.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	20.294.464.000	20.294.464.000
Belanja		
Belanja Pegawai	36.923.015.000	85.672.834.000
Belanja Barang	613.180.255.000	582.544.220.000
Belanja Modal	81.599.820.000	106.110.445.000
Jumlah Belanja	731.703.090.000	774.327.499.000

Adapun revisi anggaran belanja BPPK berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Revisi Anggaran Belanja BPPK TA 2018 per Kegiatan

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	2018	
		Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Direvisi (Rp)
1731	PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NEGARA DI DAERAH	114.348.378.000	187.504.984.000
1732	PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN	28.014.602.000	33.282.118.000
1733	PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI	30.245.603.000	30.804.657.000
1734	PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN	31.090.011.000	36.311.709.000
1735	PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI BIDANG SELAIN ANGGARAN, PERBENDAHARAAN, PERPAJAKAN, KEPABEANAN, CUKAI, KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN	30.663.738.000	29.084.117.000
1736	PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERPAJAKAN	61.598.184.000	55.397.549.000
1737	PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN SERTA PENDIDIKAN PASCASARJANA BAGI PEGAWAI DEPARTEMEN KEUANGAN	240.849.770.000	183.060.489.000
1738	PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN	130.050.178.000	142.481.362.000
1739	PENYELENGGARAAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BAGI UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BPPK	64.842.626.000	76.400.514.000
	JUMLAH	731.703.090.000	774.327.499.000

Realisasi

Pendapatan

Rp50.746.902.639

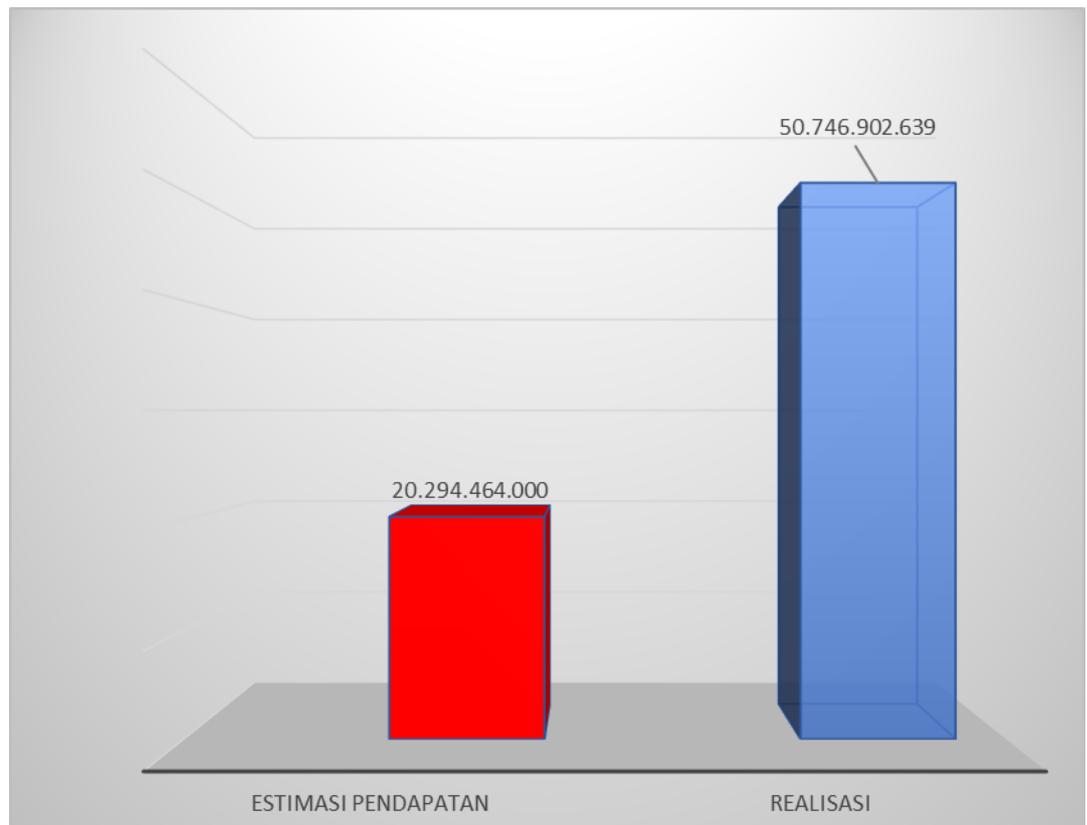
B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp50.746.902.639 atau mencapai 250,05 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp20.294.464.000. Pendapatan lingkup BPPK terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya dan Pendapatan dari Badan Layanan Umum. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2018

MAP	Uraian Pendapatan	Estimasi	Realisasi	%
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	0,00
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	15.852.000.000	34.485.270.009	217,55
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	2.997.000.000	-	0,00
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-	6.600.000	0,00
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	-	2.478.425.000	0,00
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	-	2.278.275.000	0,00
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	4.195.039.483	0,00
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	-	248.885.370	0,00
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	-	218.047.910	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	4.000.000	407.913.308	10197,83
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	51.000.000	142.300.777	279,02
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	150.294.000	213.296.073	141,92
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi	-	41.800.000	0,00
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya	1.010.000.000	1.570.000.000	155,45
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	-	393.288.000	0,00
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	1.958	0,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	16.050.000	0,00
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	-	9.090.909	0,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	221.403.971	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	37.341.539	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	3.460.293.471	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	302.703.021	0,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	4.251.140	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	230.170.000	16.625.700	7,22
	JUMLAH	20.294.464.000	50.746.902.639	250,05

Komposisi estimasi dan realisasi pendapatan BPPK TA 2018 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Estimasi dan Realisasi Pendapatan BPPK TA 2018

Realisasi PNBP Lainnya periode 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.062.821.522 atau 2,14 persen dibandingkan 31 Desember 2017. Secara umum dapat dijelaskan bahwa terdapat penurunan pendapatan BLU PKN STAN sebesar Rp 1.187.917.290 atau -2,63 persen, peningkatan berasal dari PNBP lainnya sebesar Rp 2.250.738.812 atau 49,08 persen yang diantaranya berasal dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi, serta Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Tahun 2018 terdapat perubahan penggunaan akun pendapatan yang semula menggunakan akun 423xxx menjadi akun 425xxx sesuai dengan Bagan Akun Standar terbaru nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Perbandingan realisasi pendapatan BPPK TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan TA 2017

AKUN	URAIAN PENDAPATAN	REALISASI PNBP		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	Rp	%
	PENDAPATAN PNBP LAINNYA	6.836.359.867	4.585.621.055	2.250.738.812	49,08
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	-	11.180.000	(11.180.000)	-100,00
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	175.134.000	(175.134.000)	-100,00
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	490.753.999	(490.753.999)	-100,00
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	308.401.273	(308.401.273)	-100,00
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Masing-masing Kementerian dan Pendapatan DJBC	-	1.317.000.000	(1.317.000.000)	-100,00
423221	Pendapatan Jasa dari Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	1.920.030	(1.920.030)	-100,00
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	-	220.400.000	(220.400.000)	-100,00
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	162.855.069	(162.855.069)	-100,00
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	-	61.285.000	(61.285.000)	-100,00
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	56.955.457	(56.955.457)	-100,00
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	184.029.416	(184.029.416)	-100,00
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.401.781.262	(1.401.781.262)	-100,00
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	14.032.599	(14.032.599)	-100,00
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	179.892.950	(179.892.950)	-100,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	407.913.308	-	407.913.308	0,00
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	142.300.777	-	142.300.777	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	213.296.073	-	213.296.073	0,00
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	41.800.000	-	41.800.000	0,00
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi	1.570.000.000	-	1.570.000.000	0,00
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	393.288.000	-	393.288.000	0,00
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.958	-	1.958	0,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	16.050.000	-	16.050.000	0,00
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	9.090.909	-	9.090.909	0,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	221.403.971	-	221.403.971	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	37.341.539	-	37.341.539	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3.460.293.471	-	3.460.293.471	0,00

AKUN	URAIAN PENDAPATAN	REALISASI PNBP		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	Rp	%
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	302.703.021	-	302.703.021	0,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	4.251.140	-	4.251.140	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	16.625.700	-	16.625.700	0,00
	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	43.910.542.772	45.098.460.062	(1.187.917.290)	-2,63
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	34.485.270.009	35.849.835.295	(1.364.565.286)	-3,81
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	-	-	-	0,00
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	6.600.000	755.725.756	(749.125.756)	-99,13
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	0,00
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2.478.425.000	2.118.161.750	360.263.250	17,01
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	2.278.275.000	2.434.150.000	(155.875.000)	-6,40
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	4.195.039.483	3.940.587.261	254.452.222	6,46
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	248.885.370	-	248.885.370	0,00
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	218.047.910	-	218.047.910	0,00
	JUMLAH	50.746.902.639	49.684.081.117	1.062.821.522	2,14

Adapun Rincian estimasi dan realisasi PNBP per Satuan Kerja dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per Satuan Kerja TA 2018

No	Satuan Kerja	Estimasi	Realisasi	%
1	BPPK Pusat	28.800.000	257.402.169	893,76
2	Pusdiklat PSDM	250.170.000	2.071.131.242	827,89
3	Pusdiklat KNPk	-	62.056.857	0,00
4	PKN STAN	18.849.000.000	45.807.184.938	243,02
5	Pusdiklat Pajak	-	46.864.642	0,00
6	Pusdiklat BC	1.065.000.000	1.635.664.430	153,58
7	Pusdiklat KU	-	64.763.830	0,00
8	Pusdiklat AP	6.950.000	34.443.400	495,59
9	BD Pim Magelang	-	90.840.302	0,00
10	BDK Medan	-	31.000.350	0,00
11	BDK Palembang	-	3.650.000	0,00
12	BDK Yogyakarta	31.631.000	140.942.245	445,58
13	BDK Malang	-	8.069.900	0,00
14	BDK Balikpapan	9.000.000	13.885.119	154,28
15	BDK Makassar	4.000.000	89.600.000	2240,00
16	BDK Cimahi	4.925.000	79.587.198	1615,98
17	BDK Manado	44.988.000	8.079.859	17,96
18	BDK Pontianak	-	257.791.443	0,00
19	BDK Pekanbaru	-	39.742.419	0,00
20	BDK Denpasar	-	4.202.296	0,00
	TOTAL	20.294.464.000	50.746.902.639	250,05

Realisasi Belanja **B.2. BELANJA**
 Rp683.318.210.691

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp683.318.210.691 atau 88,25 persen dari anggaran belanja sebesar Rp774.327.499.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 10 dan Tabel 11.

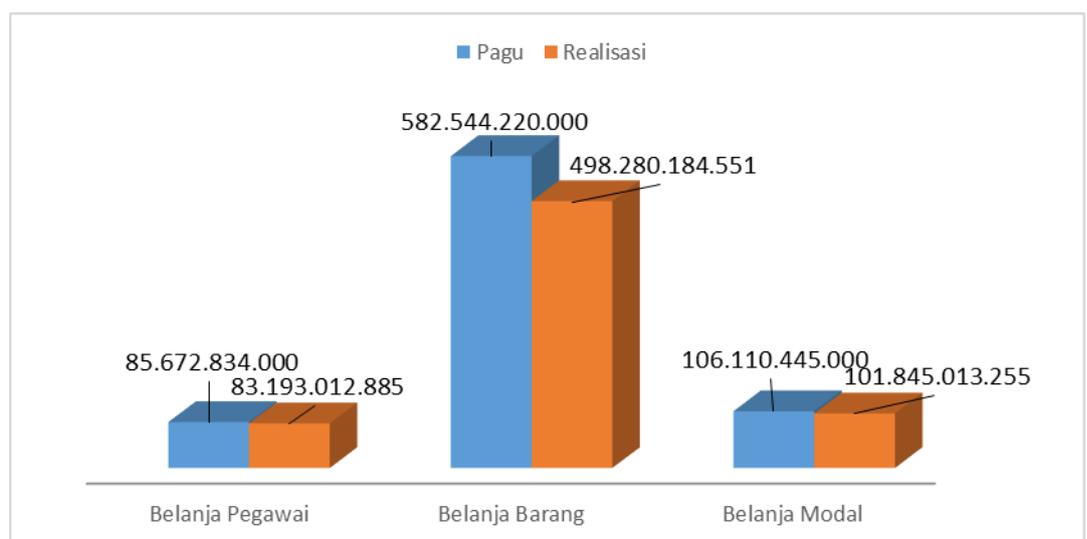
Tabel 10. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2018

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	85.672.834.000	83.248.421.556	97,17
52	Belanja Barang	582.544.220.000	500.782.355.441	85,96
53	Belanja Modal	106.110.445.000	101.845.013.255	95,98
	Total Belanja Bruto	774.327.499.000	685.875.790.252	88,58
	Pengembalian Belanja		(2.557.579.561)	
	Belanja Netto	774.327.499.000	683.318.210.691	88,25

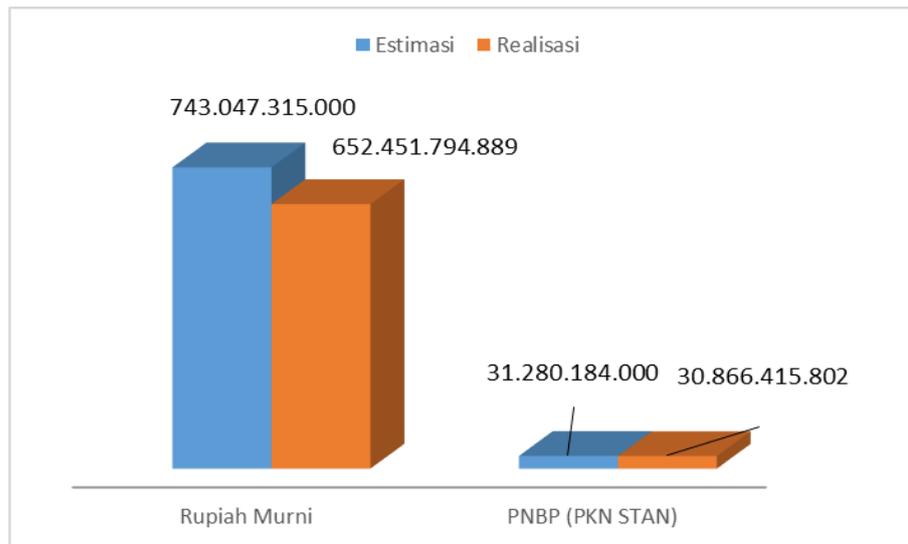
Tabel 11. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per Sumber Dana TA 2018

No	Sumber Dana	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Rupiah Murni	743.047.315.000	652.451.794.889	87,81
2	PNBP (PKN STAN)	31.280.184.000	30.866.415.802	98,68
	TOTAL	774.327.499.000	683.318.210.691	88,25

Komposisi pagu anggaran dan realisasi belanja TA 2018 dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2018



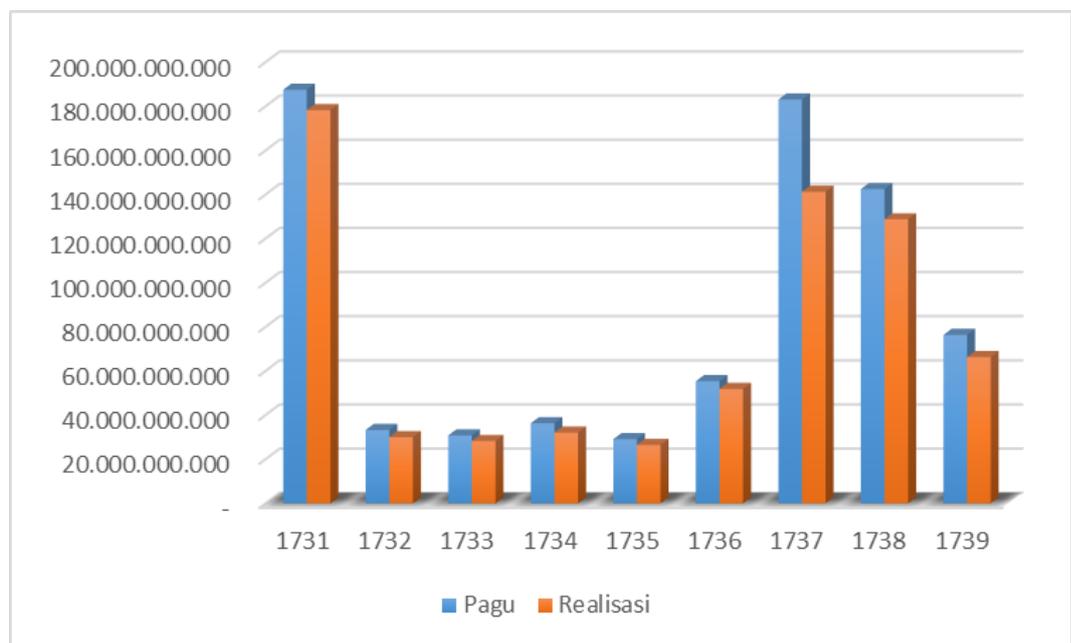
Gambar 3. Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana TA 2018

Realisasi belanja berdasarkan jenis kegiatan untuk TA 2018 dapat dilihat pada Tabel 12 dan Gambar 4.

Tabel 12. Rincian Belanja Berdasarkan Jenis Kegiatan TA 2018

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1731	PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NEGARA DI DAERAH	187.504.984.000	178.280.107.682	95,08
1732	PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN	33.282.118.000	30.010.427.567	90,17
1733	PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI	30.804.657.000	28.266.220.465	91,76
1734	PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN	36.311.709.000	32.069.086.711	88,32
1735	PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI BIDANG SELAIN ANGGARAN, PERBENDAHARAAN, PERPAJAKAN, KEPABEANAN, CUKAI, KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN	29.084.117.000	26.480.171.301	91,05
1736	PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERPAJAKAN	55.397.549.000	51.891.024.858	93,67

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1737	PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN SERTA PENDIDIKAN PASCASARJANA BAGI PEGAWAI DEPARTEMEN KEUANGAN	183.060.489.000	141.248.208.825	77,16
1738	PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN	142.481.362.000	128.771.146.395	90,38
1739	PENYELENGGARAAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BAGI UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BPPK	76.400.514.000	66.301.816.887	86,78
	JUMLAH	774.327.499.000	683.318.210.691	88,25



Gambar 4. Anggaran dan Realisasi Belanja per Kegiatan TA 2018

Pagu dan realisasi anggaran per Satuan Kerja di lingkungan BPPK dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Pagu dan Realisasi Belanja per Satuan Kerja TA 2018

No	Unit/Satker	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	BPPK Pusat	76.400.514.000	66.301.816.887	86,78
2	Pusdiklat PSDM	163.723.051.000	123.306.019.025	75,31
3	Pusdiklat KNPK	36.311.709.000	32.069.086.711	88,32
4	PKN STAN	142.481.362.000	128.771.146.395	90,38
5	Pusdiklat Pajak	55.397.549.000	51.891.024.858	93,67
6	Pusdiklat BC	30.804.657.000	28.266.220.465	91,76
7	Pusdiklat KU	29.084.117.000	26.480.171.301	91,05
8	Pusdiklat AP	33.282.118.000	30.010.427.567	90,17
9	BD Pim Magelang	19.337.438.000	17.942.189.800	92,78
10	BDK Medan	10.957.626.000	9.462.907.048	86,36
11	BDK Palembang	11.765.953.000	10.454.960.613	88,86
12	BDK Yogyakarta	18.778.156.000	18.664.074.258	99,39
13	BDK Malang	16.540.870.000	15.872.599.686	95,96
14	BDK Balikpapan	9.196.522.000	8.833.549.200	96,05
15	BDK Makassar	12.530.532.000	11.885.059.846	94,85
16	BDK Cimahi	19.748.037.000	19.421.339.724	98,35
17	BDK Manado	9.819.110.000	9.476.402.622	96,51
18	BDK Pontianak	9.519.286.000	9.056.747.346	95,14
19	BDK Pekanbaru	60.032.291.000	57.211.013.639	95,30
20	BDK Denpasar	8.616.601.000	7.941.453.700	92,16
	Total Belanja	774.327.499.000	683.318.210.691	88,25

Jika dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 33.193.078.751 atau 5,11 persen. Adapun peningkatan ini disebabkan :

1. adanya kenaikan pagu anggaran belanja pegawai yang disebabkan adanya penambahan pegawai BPPK;
2. adanya kenaikan pagu anggaran belanja barang yang berbanding dengan kenaikan realisasi belanja barang terutama pada belanja barang non operasional yang digunakan untuk kediklatan; dan
3. adanya kenaikan pagu anggaran belanja modal untuk pembangunan gedung balai diklat keuangan dan renovasi gedung.

Berikut adalah penjelasan terkait penyerapan anggaran lingkup BPPK tahun 2018.

1. Terdapat *Selfblocking* BPPK TA 2018 sebesar Rp 37 Milyar, terdiri dari :
 - a. Belanja Birokrasi di Sekretariat Badan sebesar Rp 4,6 Milyar,
 - b. Belanja Birokrasi pada Output Layanan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen sebesar Rp 11,7 Milyar, serta Output Layanan Beasiswa Pasca Sarjana sebesar Rp 15 Milyar, dan

- c. Belanja Operasional yang tersebar di seluruh satker BPPK sebesar Rp 6,7 Milyar.
2. Terdapat efisiensi dari beberapa kegiatan yang memiliki anggaran cukup signifikan dengan penjelasan sebagai berikut.
 - a. Efisiensi dari kegiatan Pelatihan Dasar CPNS sebesar Rp 16,6 Milyar yang sebagian besar merupakan efisiensi dari belanja perjalanan dinas diklat sebesar Rp 12,2 Milyar. Hal ini disebabkan pada proses penganggaran belum diketahui kebijakan penempatan CPNS lingkup Kementerian Keuangan, sedangkan pada realisasi banyak peserta diklat yang tidak menggunakan akomodasi perjalanan dinas karena masih dalam satu daerah.
 - b. Efisiensi dari Output Layanan Pendidikan Program Diploma sebesar Rp 11,1 Milyar. Hal ini disebabkan adanya perubahan kurikulum Program Diploma PKN STAN.
3. Adanya kebijakan pimpinan terkait gerakan efisiensi. Efisiensi belanja barang yang berasal dari Output Kediklatan adalah sebagai berikut.
 - a. Efisiensi dari kegiatan diklat di bidang Keuangan Umum sebesar Rp 2,2 Milyar, efisiensi ini berasal dari efisiensi perjalanan dinas diklat dan sisa hasil lelang akomodasi diklat.
 - b. Efisiensi dari kegiatan diklat di bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan sebesar Rp 1,1 Milyar,
 - c. Efisiensi dari kegiatan diklat Pengelolaan Dana Desa sebesar Rp 2,3 Milyar.
 - d. Efisiensi dari kegiatan diklat di bidang Kepabean dan Cukai sebesar Rp900 Milyar, efisiensi berasal dari belanja perjalanan dinas, honorarium tim, narasumber, pengadaan barang dan jasa, dan pemeliharaan.
 - e. Efisiensi dari kegiatan diklat di bidang Anggaran dan Perbendaharaan sebesar Rp 2,4 Milyar, efisiensi berasal dari lelang akomodasi diklat (ATK, konsumsi, laundry) dan efisiensi dari perjalanan dinas diklat.
 - f. Efisiensi dari kegiatan diklat di bidang Perpajakan sebesar Rp 1,1 Milyar, efisiensi berasal dari lelang akomodasi diklat (ATK, konsumsi, laundry) dan beberapa kegiatan yang tidak terserap (pengembangan materi pembelajaran, penelitian kajian akademis, evaluasi pasca diklat).
4. Sisa hasil lelang belanja modal.
 - a. Sisa belanja modal BDK Pekanbaru sebesar Rp 1,7 Milyar, pengadaan mundur dari jadwal yang direncanakan yang disebabkan adanya gagal

lelang sehingga dilakukan lelang ulang.

- b. Sisa belanja modal Sekretariat Badan sebesar Rp 1,7 Milyar.
- c. Sisa belanja modal satker lainnya sebesar Rp 900 Juta yang berasal dari sisa hasil lelang pengadaan.

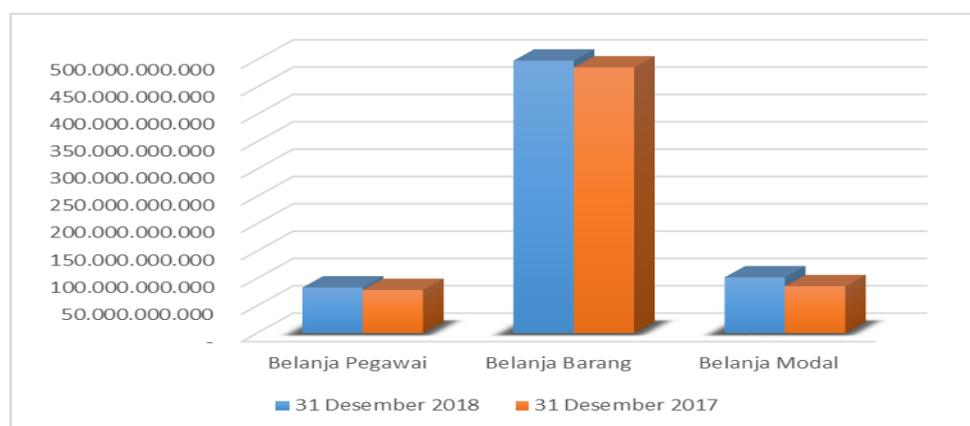
Secara singkat dapat disampaikan penyerapan anggaran BPPK sebagai berikut :

1. terdapat *Selfblocking* BPPK TA 2018 sebesar Rp 37 Milyar,
2. jumlah peserta diklat tidak sesuai dengan yang direncanakan di awal,
3. adanya perubahan kurikulum program Diploma PKN STAN sehingga terdapat sisa anggaran pada output layanan program diploma,
4. terdapat efisiensi yang berasal dari diklat pelatihan dasar CPNS untuk belanja perjalanan dinas diklat karena belum ada kejelasan penempatan pada saat penganggaran,
5. adanya kegiatan belanja modal yang mundur dari jadwal yang direncanakan karena lelang ulang dan perubahan rencana kebutuhan pengadaan,
6. adanya efisiensi dari akomodasi diklat, seperti ATK diklat, konsumsi diklat, dan laundry.

Perbandingan realisasi belanja BPPK menurut jenis belanja antara TA 2018 dengan TA 2017 dapat dilihat pada Tabel 14 dan Gambar 5.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan TA 2017

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2018	31 Desember 2017	Rp	%
51	Belanja Pegawai	83.193.012.885	78.720.372.595	4.472.640.290	5,68
52	Belanja Barang	498.280.184.551	485.787.347.824	12.492.836.727	2,57
53	Belanja Modal	101.845.013.255	85.617.411.521	16.227.601.734	18,95
	TOTAL	683.318.210.691	650.125.131.940	33.193.078.751	5,11



Gambar 5. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan TA 2017

Belanja Pegawai
Rp83.193.012.885

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp83.193.012.885 dan Rp78.720.372.595. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai BPPK TA 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp4.472.640.290 atau 5,68% dibanding realisasi TA 2017. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai BPPK yang berasal dari penerimaan Calon PNS dan Widyaiswara.

Informasi pagu dan realisasi anggaran belanja pegawai TA 2018 dapat dilihat pada Tabel 15, sedangkan perbandingan antara realisasi belanja pegawai TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 15. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai TA 2018

Akun	Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	84.954.402.000	83.010.398.556	97,71
5122	Belanja Lembur	718.432.000	238.023.000	33,13
	Jumlah Bruto	85.672.834.000	83.248.421.556	97,17
	Pengembalian Belanja		(55.408.671)	
	Jumlah Neto	85.672.834.000	83.193.012.885	97,11

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017

Akun	Belanja Pegawai	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	83.010.398.556	78.236.018.629	4.774.379.927	6,10%
5122	Belanja Lembur	238.023.000	502.820.000	(264.797.000)	-52,66%
	Jumlah Bruto	83.248.421.556	78.738.838.629	4.509.582.927	5,73%
	Pengembalian Belanja	(55.408.671)	(18.466.034)	(36.942.637)	200,06%
	Jumlah Neto	83.193.012.885	78.720.372.595	4.472.640.290	5,68%

Belanja Barang
Rp498.280.184.551

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar

Rp498.280.184.551 dan Rp485.787.347.824.

Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp12.492.836.727 atau 2,57% dibandingkan dengan TA 2017. Adapun peningkatan ini disebabkan hal-hal sebagai berikut.

1. Belanja operasional lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja operasional digunakan untuk kegiatan operasional perkantoran. Hal ini disebabkan adanya penambahan gedung dan bangunan satuan kerja dan sudah mulai digunakan di tahun 2018.
2. Belanja non operasional lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya karena terdapat efisiensi dari kegiatan kediklatan pada satuan kerja di lingkungan BPPK. Belanja non operasional digunakan untuk kegiatan kediklatan.
3. Belanja barang persediaan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Persediaan sebagian besar digunakan untuk keperluan kediklatan dan sebagian untuk keperluan perkantoran, misalnya ATK diklat dan obat-obatan untuk peserta diklat. Pertambahan ini seiring dengan pertambahan jumlah diklat di BPPK.
4. Belanja pemeliharaan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah dan nilai aset di lingkungan BPPK.
5. Belanja jasa mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Belanja jasa profesi yang mengalami peningkatan terbesar digunakan untuk honorarium pengajar dan narasumber kegiatan diklat, karena beberapa diklat menggunakan pengajar / narasumber dari luar instansi.
6. Belanja perjalanan dalam negeri juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah diklat dan jumlah pegawai Kementerian Keuangan. Belanja perjalanan dalam negeri BPPK sebagian besar digunakan untuk perjalanan dinas diklat peserta diklat.

Informasi pagu dan realisasi anggaran belanja barang TA 2018 dapat dilihat pada Tabel 17, sedangkan perbandingan antara realisasi belanja barang TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 17. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Barang TA 2018

Akun	Belanja Barang	Anggaran	Realisasi	%
5211	Belanja Barang Operasional	40.430.296.000	38.046.662.917	94,10
5212	Belanja Barang Non Operasional	261.085.666.000	222.760.221.830	85,32
5218	Belanja Barang Persediaan	27.293.252.000	23.953.442.992	87,76
5221	Belanja Jasa	93.565.894.000	83.272.309.793	89,00
5231	Belanja Pemeliharaan	22.535.209.000	18.745.277.667	83,18
5241	Belanja Perjalanan dalam negeri	100.077.369.000	78.175.111.711	78,11
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	6.276.350.000	4.959.179.910	79,01
5251	Belanja Barang BLU	31.280.184.000	30.870.148.621	98,69
	Jumlah Bruto	582.544.220.000	500.782.355.441	85,96
	Pengembalian Belanja		(2.502.170.890)	
	Jumlah Neto	582.544.220.000	498.280.184.551	85,54

Tabel 18. Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017

Akun	Belanja Barang	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
5211	Belanja Barang Operasional	38.046.662.917	31.577.371.906	6.469.291.011	20,49%
5212	Belanja Barang Non Operasional	222.760.221.830	261.189.355.257	(38.429.133.427)	-14,71%
5218	Belanja Barang Persediaan	23.953.442.992	15.063.918.980	8.889.524.012	59,01%
5221	Belanja Jasa	83.272.309.793	75.616.770.359	7.655.539.434	10,12%
5231	Belanja Pemeliharaan	18.745.277.667	13.509.992.235	5.235.285.432	38,75%
5241	Belanja Perjalanan dalam negeri	78.175.111.711	52.716.500.219	25.458.611.492	48,29%
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	4.959.179.910	6.850.356.485	(1.891.176.575)	-27,61%
5251	Belanja Barang BLU	30.870.148.621	32.152.844.464	(1.282.695.843)	-3,99%
	Jumlah Bruto	500.782.355.441	488.677.109.905	12.105.245.536	2,48%
	Pengembalian Belanja	(2.502.170.890)	(2.889.762.081)	387.591.191	-13,41%
	Jumlah Neto	498.280.184.551	485.787.347.824	12.492.836.727	2,57%

Belanja Modal
Rp101.845.013.255

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp101.845.013.255 dan Rp85.617.411.521. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp16.227.601.734 atau 18,95% dibandingkan TA 2017. Berikut adalah beberapa penjelasan terkait penyerapan anggaran belanja modal TA 2018.

1. Kegiatan belanja modal selama tahun 2018 telah dilaksanakan dan terdapat sisa hasil lelang (efisiensi) dari pengadaan belanja modal. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya : mundurnya jadwal pengadaan karena adanya kendala pada saat proses lelang dan adanya perubahan kebutuhan belanja modal.

2. Pengadaan belanja modal terbesar terdapat di BDK Pekanbaru, yaitu pengadaan gedung dan bangunan balai diklat dengan pagu sebesar Rp 48 Milyar, dari nilai tersebut terealisasi sebesar Rp 46,6 Milyar sehingga terdapat sisa hasil lelang (efisiensi) sebesar Rp 1,7 Milyar.
3. Pengadaan belanja modal berikutnya adalah pada Sekretariat Badan dengan nilai belanja modal Rp 25 Milyar, dari nilai tersebut terealisasi sebesar Rp 23,5 Milyar sehingga terdapat sisa hasil lelang (efisiensi) sebesar Rp 1,7 Milyar. Pengadaan ini berupa pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran, kendaraan bermotor, dan buku perpustakaan.
4. Pengadaan belanja modal pada PKN STAN dengan nilai belanja modal sebesar Rp 15,3 Milyar, dari nilai tersebut terealisasi sebesar Rp 15,1 Milyar. Pengadaan ini berupa pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran, gedung/bangunan.
5. Efisiensi dari pengadaan belanja modal lainnya dari satuan kerja di lingkungan BPPK sebesar Rp 700 juta.

Informasi pagu dan realisasi anggaran belanja modal TA 2018 dapat dilihat pada Tabel 19, sedangkan perbandingan antara realisasi belanja modal TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 19. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Modal TA 2018

Akun	Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	%
5311	Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.156.967.000	41.125.873.761	95,29
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.695.438.000	60.623.244.488	96,69
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	65.230.000	64.955.000	99,58
5361	Belanja Modal Lainnya	192.810.000	30.940.006	16,05
	Jumlah Bruto	106.110.445.000	101.845.013.255	95,98
	Pengembalian Belanja		-	
	Jumlah Neto	106.110.445.000	101.845.013.255	95,98

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017

Akun	Belanja Modal	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
5311	Belanja Modal Tanah	-	1.854.000	(1.854.000)	-100,00%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.125.873.761	61.531.044.908	(20.405.171.147)	-33,16%
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.623.244.488	17.246.278.494	43.376.965.994	251,51%
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	64.955.000	384.577.600	(319.622.600)	-83,11%
5361	Belanja Modal Fisik Lainnya	30.940.006	894.482.979	(863.542.973)	-96,54%
5371	Belanja Modal BLU	-	5.590.173.540	(5.590.173.540)	-100,00%
	Jumlah Bruto	101.845.013.255	85.648.411.521	16.196.601.734	18,91%
	Pengembalian Belanja	-	(31.000.000)	31.000.000	-100,00%
	Jumlah Neto	101.845.013.255	85.617.411.521	16.227.601.734	18,95%

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.854.000. Tidak terdapat anggaran belanja modal tanah untuk tahun 2018. Tidak terdapat mutasi belanja modal tanah.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2018 adalah sebesar Rp41.125.873.761, mengalami penurunan sebesar Rp 20.405.171.147 atau -33,16 persen bila dibandingkan dengan TA 2017. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun sebelumnya, anggaran peralatan dan mesin mengalami penurunan yang cukup signifikan karena pada tahun 2017 terdapat kebutuhan untuk mengisi peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan asrama baru di Pusdiklat Pajak dan BDK Pontianak, pengadaan peralatan pendukung IT dan komunikasi, serta adanya pengadaan *Smart Classroom*.

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan TA 2017

Akun	Belanja Modal	31 Desember 2018	31 Desember 2017	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.125.873.761	61.511.503.381	-33,14
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	19.541.527	-100,00
	Jumlah Bruto	41.125.873.761	61.531.044.908	-33,16
	Pengembalian Belanja	-	31.000.000	-100,00
	Jumlah Neto	41.125.873.761	61.500.044.908	-33,13

Mutasi belanja modal peralatan dan mesin selama periode 2018 adalah sebagai berikut.

532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	41.125.873.761
MUTASI :			
	Pembelian	Rp	38.732.859.145
	Penyelesaian pembangunan langsung	Rp	1.240.000
	Pengembangan langsung	Rp	130.792.000
	Perolehan KDP	Rp	1.597.557.850
	Pengembangan KDP	Rp	194.080.887
TOTAL MUTASI ASET		Rp	40.656.529.882
SELISIH		Rp	469.343.879
PENJELASAN SELISIH:			
	Pembelian Ekstrakomptabel	Rp	429.743.876
	Pembulatan	Rp	3
	Kurang/ Lebih Kapitalisasi	Rp	39.600.000

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp60.623.244.488 dan Rp17.246.278.494. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat pengadaan belanja modal pengadaan gedung dan bangunan pada BDK Pekanbaru; renovasi gedung pada : BDK Manado, Sekretariat Badan, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, BD Pim Magelang, dan BDK Pontianak.

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2018 dan TA 2017

Akun	Belanja Modal	31 Desember 2018	31 Desember 2017	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.055.346.797	7.651.467.661	567,26
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	9.567.897.691	9.594.810.833	-0,28
	Jumlah Bruto	60.623.244.488	17.246.278.494	251,51
	Pengembalian Belanja	-	-	0,00
	Jumlah Neto	60.623.244.488	17.246.278.494	251,51

Mutasi belanja modal gedung dan bangunan selama periode 2018 adalah sebagai berikut.

533	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	60.623.244.488
MUTASI :			
	Pembelian	Rp	2.635.832.010
	Penyelesaian pembangunan langsung	Rp	394.227.185
	Pengembangan langsung	Rp	1.423.482.987
	Perolehan KDP	Rp	7.245.538.127
	Pengembangan KDP	Rp	48.161.292.579
TOTAL MUTASI ASET		Rp	59.860.372.888
SELISIH		Rp	762.871.600
PENJELASAN SELISIH:			
	BM Gedung Bangunan untuk Pengembangan/Perolehan Aset selain GB	Rp	762.871.600

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp64.955.000 dan Rp 384.577.600.

**Tabel 23. Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2018 dan TA 2017**

Akun	Belanja Modal	31 Desember 2018	31 Desember 2017	%
534121	Belanja Modal Irigasi	-	-	-
534131	Belanja Modal Jaringan	64.955.000	384.577.600	(83,11)
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi	-	-	-
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	-	-	-
	Jumlah Bruto	64.955.000	384.577.600	(83,11)
	Pengembalian Belanja			
	Jumlah Neto	64.955.000	384.577.600	(83,11)

Mutasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan selama periode 2018 adalah sebagai berikut.

534	Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan	Rp	64.955.000
TOTAL BELANJA			
MUTASI :			
	Pembelian	Rp	189.080.100
	Penyelesaian pembangunan langsung	Rp	-
	Pengembangan langsung	Rp	525.556.500
	Perolehan KDP	Rp	-
	Pengembangan KDP	Rp	-
TOTAL MUTASI ASET		Rp	714.636.600
SELISIH		-Rp	649.681.600
PENJELASAN SELISIH:			
	Perolehan/Pengembangan JIJ dari BM selain BM JIJ	-Rp	714.636.600
	JIJ Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp	64.955.000

*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 30.940.006 dan Rp 894.482.979. Belanja modal lainnya tahun 2017 lebih besar karena terdapat pembelian untuk buku-buku perpustakaan lingkup BPPK, sedangkan tahun 2018 pembelian buku perpustakaan hanya di lingkup Sekretariat Badan.

**Tabel 24. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2018 dan TA 2017**

Akun	Belanja Modal	31 Desember 2018	31 Desember 2017	%
536111	Belanja Modal Lainnya	30.940.006	894.482.979	-96,54
	Jumlah Bruto	30.940.006	894.482.979	-96,54
	Pengembalian Belanja	-	-	0,00
	Jumlah Neto	30.940.006	894.482.979	-96,54

Mutasi belanja modal aset tak berwujud periode 2018 adalah sebagai berikut.

536	Belanja Modal Lainnya	Rp	30.940.006
MUTASI :			
	Pembelian ATB	Rp	5.475.462
	Pembelian Aset Tetap Lainnya	Rp	25.464.544
	Penyelesaian pembangunan langsung	Rp	-
	Pengembangan langsung	Rp	-
	Perolehan KDP	Rp	-
	Pengembangan KDP	Rp	-
TOTAL MUTASI ASET		Rp	30.940.006
SELISIH		Rp	-

B.6 Belanja Badan Layanan Umum

Belanja Badan Layanan Umum di BPPK hanya dimiliki oleh PKN STAN. Realisasi Belanja BLU TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp30.866.415.802 dan Rp 37.743.018.004. Realisasi TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp -79,52 persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 terdapat belanja modal BLU, sedangkan tahun 2018 tidak ada belanja modal BLU. Selain itu terdapat penurunan pada belanja barang BLU yang disebabkan jumlah pendaftar tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan penerapan *Computer Assisted Test (CAT)* sehingga lebih efisien. Belanja barang BLU ini digunakan untuk kegiatan penerimaan mahasiswa baru PKN STAN

**Tabel 25. Perbandingan Realisasi Belanja BLU
TA 2018 dan TA 2017**

Akun	Uraian Belanja	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	%
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.304.829.656	1.956.793.704	(33,32)
525112	Belanja Barang	2.844.571.119	10.572.003.443	(73,09)
525113	Belanja Jasa	21.701.584.268	14.385.436.462	50,86
525114	Belanja Pemeliharaan	1.102.681.372	1.464.411.529	(24,70)
525115	Belanja Perjalanan	3.656.475.181	3.429.556.667	6,62
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	260.007.025	344.642.659	(24,56)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	-	4.654.456.055	(100,00)
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	-	935.717.485	(100,00)
Jumlah Bruto		30.870.148.621	37.743.018.004	(18,21)
Pengembalian Belanja		(3.732.819)	-	
Jumlah Neto		30.866.415.802	37.743.018.004	(18,22)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp18.800.000*

C.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar masing-masing Rp18.800.000 dan Rp10.000.000. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 26. Rincian Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2018 dan 2017

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Uang Tunai	Rp -	Rp -
Rekening Bank	Rp 18.800.000	Rp 10.000.000
Jumlah	Rp 18.800.000	Rp 10.000.000

Nilai Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp18.800.000 adalah Pendapatan sewa tanah, gedung, bangunan Pusdiklat Bea dan Cukai sebesar Rp17.800.000 dan merupakan uang setoran dari peserta ujian sertifikasi ahli kepabeanaan periode bulan Februari 2019 yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp1.000.000.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.865.808.583. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Kas Pada Badan
Layanan Umum
Rp99.424.806.073*

C.3 Kas Pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas Pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp99.424.806.073 dan Rp86.380.679.103 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, uang muka kerja maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Administrasi Keuangan BLU PKN STAN yang sumbernya berasal dari penerimaan kegiatan operasional BLU.

**Tabel 27. Rekosilisasi Kas pada Badan Layanan Umum
PKN STAN**

Uraian	31 Desember 2018
Saldo Kas Rekening Koran - Operasional	443.142.161
Saldo Kas Rekening Koran - Dana Kelolaan	20.745.093.354
Saldo Kas Rekening Koran - Pengelolaan Kas	8.224.842.100
Kas Tunai di Bendahara	11.729.057
Deposito	70.000.000.000
Selisih Pembulatan	(599)
Jumlah	99.424.806.073

Pada tanggal neraca, PKN STAN memiliki 5 deposito berjangka yaitu:

- a. deposito berjangka 1 bulan pada Bank BTN dengan tanggal penempatan 27 Desember 2018 senilai Rp15.000.000.000 tingkat bunga 7,25%;
- b. deposito berjangka 3 bulan pada Bank BTN dengan tanggal penempatan 27 Desember 2018 senilai Rp 13.000.000.000 tingkat bunga 7,25%;
- c. deposito Berjangka 1 bulan pada Bank Mandiri dengan tanggal penempatan 31 Desember 2018 senilai Rp10.000.000.000 tingkat bunga 7,40%;
- d. deposito Berjangka 3 bulan pada Bank Mandiri dengan tanggal penempatan 31 Desember 2018 senilai Rp 16.000.000.000 tingkat bunga 7,40%; Laporan Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Anggaran 2018 36 Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum Rp 0; dan
- e. deposito Berjangka 3 bulan pada Bank Mandiri dengan tanggal penempatan 31 Desember 2018 senilai Rp 16.000.000.000 tingkat bunga 7,40%.

*Uang Muka
Belanja Pegawai
(Prepayment)
Rp267.500*

C.4 Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp267.500 dan Rp2.325.422. Uang Muka Belanja di BPPK tahun 2018 berasal dari persekot (berupa pembayaran uang muka gaji pegawai) yang diberikan kepada pegawai sebesar Rp10.770.400 dan telah dilunasi sebesar Rp10.502.900. Rincian Uang Muka Belanja disajikan pada Tabel 28.

**Tabel 28. Rincian Uang Muka Belanja (Prepayment)
per 31 Desember 2018**

Satker	Jumlah (Rp)
PKN STAN	267.500
Jumlah	267.500

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp33.604.557*

C.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp33.604.557 dan Rp215.013.699. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

**Tabel 29. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
per 31 Desember 2018**

Satker	Jumlah (Rp)	Keterangan
PKN STAN	22.246.575	Saldo tahun 2018 merupakan pendapatan bunga atas jasa layanan perbankan yaitu penempatan deposito di Bank BTN selama jangka waktu 27 Desember s.d. 31 Desember 2018, yang telah dihitung sebesar jumlah bunga neto setelah dipotong PPh (Potongan PPh telah dikembalikan oleh ke Rekening RPL 019 PKN STAN pada 5 Maret 2019.
BDK Manado	11.179.148	Pendapatan yang masih harus diterima ini merupakan pendapatan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan renovasi gedung asrama dan kelas pada Balai Diklat Keuangan Manado Tahun Anggaran 2018 dimana jatuh tempo kontrak pada tanggal 24 Desember 2018 dan BAST hasil pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2018.
Sekretariat BPPK	178.834	Kekurangan pembayaran kantin tahun 2018
Jumlah	33.604.557	

*Piutang Bukan
Pajak
Rp1.798.266.387*

C.6 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp1.798.266.387 dan Rp2.514.327.607. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30. Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018

Uraian	Nama Debitur	Saldo Piutang (Rp)
BPPK Pusat	CV Kautsar	7.219.940
Pusdiklat PSDM	Asuransi Raya	24.888.600
Pusdiklat PSDM	PT. Kadita Berseri	35.000.000
Pusdiklat KNPK	PT Grahacipta Ramapratama	52.936.203
Pusdiklat KNPK	Uang Makan	2.262.750
PKN STAN	CV Putra Mahakam Kalisamarindo	74.399.985
PKN STAN	CV Putra Mahakam Kalisamarindo	60.245.022
BDK Pekanbaru	CV Srikandi	411.146.280
BDK Manado	PT Paringgawana Bumijaya	214.314.399
BDK Manado	CV Sinar	14.639.598
BDK Manado	Adenan H.	2.126.400
PKN STAN	Piutang Lainnya	138.274.548
BDK Pekanbaru	Piutang Lainnya	760.812.662
		1.798.266.387

Rincian Piutang lainnya merupakan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berupa Garansi Bank yang belum dicairkan dari a.n. CV. Tujuh Samedera (PKN STAN) dan a.n. PT Bangun Bumi Persada (BDK Pekanbaru).

*Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/T
untutan Ganti
Rugi Rp8.760.000*

C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah Rp8.716.200 dan Rp0, Nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) merupakan selisih bersih antara Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Tabel 31. Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018

Satker	Saldo Piutang (Rp)
BDK Cimahi	8.760.000
	8.760.000

*Piutang dari
Kegiatan
Operasional
Badan Layanan
Umum
Rp290.350.000*

C.8 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp290.350.000 dan Rp290.350.000. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum disajikan pada Tabel 32.

Tabel 32. Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2018

No.	Debitur	Jumlah (Rp)
1	Mahasiswa Prodip I OC PBB	290.350.000
	Jumlah	290.350.000

*Piutang dari
Kegiatan Non
Operasional
Badan Layanan
Umum
Rp467.335.113*

C.9 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp467.335.113 dan Rp467.335.113. Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum disajikan pada Tabel 33.

Tabel 33. Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2018

No.	Debitur	Jumlah (Rp)
1	PT Sarana Karja Jasa (sudah dilimpahkan)	286.664.703
2	PT Nugraha Adi Taruna (sudah dilimpahkan)	180.670.410
	Jumlah	467.335.113

Piutang dari PT Sarana Karya Jasa yang telah dikategorikan macet, proses penagihannya telah dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V (KPKNL-V), sesuai dengan surat pelimpahan yang telah diajukan BLU STAN kepada KPKNL-V dengan Surat Nomor S-036/AK.1/2012 tanggal 26 Maret 2012. Begitu pula dengan piutang dari PT Nugraha Adi Taruna, proses penagihannya telah dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Banten, sesuai dengan surat PUPN Cabang Banten Nomor SP3N-4/PUPNC.14.03/2015 tanggal 12 Oktober 2015.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 1.659.152.090*

C.10 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 1.659.152.090 dan Rp1.526.559.051. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan

dapat dilihat pada Tabel 34.

**Tabel 34. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
Per 31 Desember 2018**

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek (Rp)	% Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	901.349.960	0,50%	4.506.750
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	896.916.427	100%	896.916.427
Jumlah	1.798.266.387		901.423.177
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
Lancar	8.760.000	0,50%	43.800
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	8.760.000		43.800
Piutang Kegiatan Operasional BLU			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	290.350.000	100%	290.350.000
Jumlah	290.350.000		290.350.000
Piutang Kegiatan Non Operasional BLU			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	467.335.113	100%	467.335.113
Jumlah	467.335.113		467.335.113
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1.672.452.449		1.659.152.090

Persediaan

Rp4.738.927.778

C.11 Persediaan

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp4.738.927.778 dan Rp3.909.185.171. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perbandingan rincian Persediaan Per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel 35.

Tabel 35. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Barang Konsumsi	4.010.118.526	3.500.165.144
Barang Untuk Pemeliharaan	297.238.582	254.022.842
Suku Cadang	9.045.644	-
Bahan Baku	178.000	149.206
Persediaan Lainnya	422.347.026	154.847.979
Jumlah	4.738.927.778	3.909.185.171

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp5.702.028.221.000

C.12 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BPPK per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.702.028.221.000 dan Rp5.702.028.221.000. Terdapat mutasi Tanah yaitu Transfer Masuk berupa Tanah Persil seluas 300 m2 senilai Rp1.428.488.000 dan Transfer Keluar berupa Tanah Persil seluas 300 m2 senilai Rp1.428.488.000.

Rincian aset tetap Tanah disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan

Mesin

Rp349.987.715.606

C.13 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 349.987.715.606 dan Rp320.598.980.382. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dijelaskan pada Tabel 36.

Tabel 36. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo per 31 Desember 2017	Rp 320.598.980.382
Penambahan :	
Saldo Awal	Rp 11.433.467.857
Pembelian	Rp 38.742.846.480
Transfer Masuk	Rp 11.408.714.112
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 269.128.350
Reklasifikasi Masuk	Rp 1.980.000
Perolehan Lainnya	Rp 4.123.101
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp 132.032.000
Pengembangan Melalui KDP	Rp 17.268.387
Penggunaan Kembali BMN yg Sudah Dihentikan	Rp 135.035.400
Jumlah	Rp 62.144.595.687
Pengurangan	
Transfer Keluar	Rp (11.408.714.112)
Reklasifikasi Keluar	Rp (1.980.000)
Koreksi Pencatatan	Rp (12.874.460.148)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp (8.470.706.203)
Jumlah	Rp (32.755.860.463)
Saldo P&M per 31 Des 2018	Rp 349.987.715.606
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2018	Rp 252.521.666.523
Nilai Buku P&M per 31 Des 2018	Rp 97.466.049.083

Rincian mutasi tambah masing-masing dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 37. Saldo Awal

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	207	239.944.262
2	ALAT KANTOR	433	2.127.529.599
3	ALAT RUMAH TANGGA	2.946	9.065.993.996
TOTAL		3.586	11.433.467.857

Tabel 38. Pembelian

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT BANTU	26	330.237.910
2	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	35	7.327.103.930
3	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	7	10.681.000
4	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	6	190.740.000
5	ALAT BENGKEL BERMESIN	1	2.145.000
6	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	9.185.000
7	ALAT UKUR	20	682.000.000
8	ALAT KANTOR	1.057	5.725.350.914
9	ALAT RUMAH TANGGA	1.876	7.749.323.209
10	ALAT STUDIO	303	2.633.101.122
11	ALAT KOMUNIKASI	42	113.870.309
12	ALAT KEDOKTERAN	18	85.100.346
13	ALAT KESEHATAN UMUM	6	98.120.000
14	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	20	195.800.000
15	KOMPUTER UNIT	802	11.723.473.489
16	PERALATAN KOMPUTER	204	1.689.105.143
17	ALAT SAR	2	4.397.208
18	PERALATAN OLAH RAGA	14	173.111.900
TOTAL		4.441	38.742.846.480

Tabel 39. Transfer Masuk

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	27	5.833.420.000
2	ALAT KANTOR	102	464.343.000
3	ALAT RUMAH TANGGA	529	1.369.650.745
4	KOMPUTER UNIT	260	3.492.647.367
5	PERALATAN KOMPUTER	2	248.653.000
TOTAL		920	11.408.714.112

Tabel 40. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT RUMAH TANGGA	2	39.755.000
2	PERALATAN KOMPUTER	10	229.373.350
TOTAL		12	269.128.350

Tabel 41. Reklasifikasi Masuk

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT KANTOR	1	1.980.000
TOTAL		1	1.980.000

Tabel 42. Perolehan Lainnya

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT RUMAH TANGGA	1	2.484.101
2	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	1.639.000
TOTAL		2	4.123.101

Tabel 43. Pengembangan Nilai Aset (Langsung)

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2	3.870.000
2	ALAT UKUR	2	8.010.000
3	ALAT KANTOR	7	15.922.000
4	ALAT RUMAH TANGGA	5	17.930.000
5	ALAT STUDIO	1	68.640.000
6	KOMPUTER UNIT	4	8.160.000
7	PERALATAN KOMPUTER	2	9.500.000
TOTAL		23	132.032.000

Tabel 44. Pengembangan Melalui KDP

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT KANTOR	1	5.360.000
2	ALAT RUMAH TANGGA	1	11.908.387
TOTAL		2	17.268.387

Tabel 45. Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT KANTOR	2	98.520.400
2	KOMPUTER UNIT	2	24.669.000
3	PERALATAN KOMPUTER	4	11.846.000
TOTAL		8	135.035.400

Adapun mutasi kurang masing-masing dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 46. Transfer Keluar

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	27	(5.833.420.000)
2	ALAT KANTOR	102	(464.343.000)
3	ALAT RUMAH TANGGA	529	(1.369.650.745)
4	KOMPUTER UNIT	260	(3.492.647.367)
5	PERALATAN KOMPUTER	2	(248.653.000)
TOTAL		920	(11.408.714.112)

Tabel 47. Reklasifikasi Keluar

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT KANTOR	1	(1.980.000)
TOTAL		1	(1.980.000)

Tabel 48. Koreksi Pencatatan

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT RUMAH TANGGA	1	(12.874.460.148)
TOTAL		1	-12.874.460.148

Tabel 49. Penghentian Aset dari Penggunaan

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT BESAR DARAT	1	(34.332.650)
2	ALAT BANTU	34	(390.475.986)
3	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4	(624.735.372)
4	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	4	(4.980.000)
5	ALAT UKUR	50	(15.000.000)
6	ALAT KANTOR	135	(2.070.803.938)
7	ALAT RUMAH TANGGA	971	(1.194.744.900)
8	ALAT STUDIO	207	(223.821.330)
9	ALAT KOMUNIKASI	37	(68.524.777)
10	PERALATAN PEMANCAR	2	(3.180.000)
11	ALAT KEDOKTERAN	4	(1.896.000)
12	KOMPUTER UNIT	310	(3.229.151.240)
13	PERALATAN KOMPUTER	106	(607.160.010)
14	PERALATAN OLAH RAGA	1	(1.900.000)
TOTAL		1.866	(8.470.706.203)

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan*

Rp914.120.177.720

C.14 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp914.120.177.720 dan Rp900.253.028.051.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan dapat dilihat pada Tabel 50.

Tabel 50. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan

Saldo per 31 Desember 2017	Rp	900.253.028.051
Penambahan :		
Saldo Awal	Rp	364.083.385
Pembelian	Rp	2.635.832.010
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	2.331.033.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	418.607.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	27.561.105
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	1.423.482.987
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	48.235.000
Pengembangan Melalui KDP	Rp	9.545.205.432
Jumlah	Rp	16.794.039.919
Pengurangan		
Reklasifikasi Keluar	Rp	(418.607.000)
Koreksi Pencatatan	Rp	(2.438.633.250)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	Rp	(69.650.000)
Jumlah	Rp	(2.926.890.250)
Saldo G&B per 31 Desember 2018	Rp	914.120.177.720
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp	55.454.392.707
Nilai Buku G&B per 31 Desember 2018	Rp	858.665.785.013

Mutasi tambah berupa:

Tabel 51. Saldo Awal

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3	364.083.385
TOTAL		3	364.083.385

Tabel 52. Pembelian

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	2.635.832.010
TOTAL		2	2.635.832.010

Tabel 53. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3	1.063.392.041
2	TUGU/TANDA BATAS	1	1.267.640.959
TOTAL		4	2.331.033.000

Tabel 54. Reklasifikasi Masuk

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	418.607.000
TOTAL		1	418.607.000

Tabel 55. Penyelesaian Pembangunan Langsung

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	27.561.105
TOTAL		1	27.561.105

Tabel 56. Pengembangan Nilai Aset (Langsung)

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	9	1.224.704.187
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	198.778.800
TOTAL		10	1.423.482.987

Tabel 57. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	48.235.000
TOTAL		1	48.235.000

Tabel 58. Pengembangan Melalui KDP

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	11	7.475.262.717
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2	2.069.942.715
TOTAL		13	9.545.205.432

Adapun mutasi kurang masing-masing dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 59. Reklasifikasi Keluar

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	(418.607.000)
TOTAL		1	(418.607.000)

Tabel 60. Koreksi Pencatatan

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	(2.438.633.250)
TOTAL		1	(2.438.633.250)

Tabel 61. Penghentian Aset dari Penggunaan

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	(59.570.000)
2	TUGU/TANDA BATAS	1	(10.080.000)
TOTAL		2	(69.650.000)

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 38.318.120.157

C.15 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp38.318.120.157 dan Rp36.419.374.778. Mutasi asset JIJ berasal dari mutasi Jaringan.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan dapat dilihat pada Tabel 62.

Tabel 62. Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo per 31 Desember 2017	Rp	36.419.374.778
Penambahan :		
Saldo Awal	Rp	693.230.789
Pembelian	Rp	189.080.100
Reklasifikasi Masuk	Rp	64.955.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	366.666.080
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	525.556.500
Pengembangan Melalui KDP	Rp	59.256.910
Jumlah	Rp	1.898.745.379
Pengurangan		
Jumlah	Rp	-
Saldo JIJ per 31 Desember 2018	Rp	38.318.120.157
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp	11.068.654.756
Nilai Buku JIJ per 31 Desember 2018	Rp	27.249.465.401

Mutasi terhadap aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan berasal dari Mutasi Tambah

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63. Saldo Awal

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	3	79.795.190
2	INSTALASI LAIN	1	613.435.599
TOTAL		4	693.230.789

Tabel 64. Pembelian

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	JALAN	1	189.080.100
TOTAL		1	189.080.100

Tabel 65. Reklasifikasi Masuk

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	INSTALASI LAIN	1	64.955.000
TOTAL		1	64.955.000

Tabel 66. Penyelesaian Pembangunan Langsung

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	JALAN	197	79.852.080
2	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TA	1	127.600.000
3	JARINGAN LISTRIK	1	159.214.000
TOTAL		199	366.666.080

Tabel 67. Pengembangan Nilai Aset (Langsung)

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	JALAN	206.963	525.556.500
TOTAL		206.963	525.556.500

Tabel 67. Pengembangan Melalui KDP

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	1	59.256.910
TOTAL		1	59.256.910

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap
Lainnya Rp
15.767.499.956

C.16 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember

2017 adalah masing-masing sebesar Rp15.767.499.956 dan Rp16.280.591.524.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat pada Tabel 68.

Tabel 68. Mutasi Aset tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2017	Rp 16.280.591.524
Penambahan :	
Saldo Awal	Rp 747.761.502
Pembelian	Rp 152.335.519
Transfer Masuk	Rp 7.197.600
Jumlah	Rp 907.294.621
Pengurangan	
Transfer Keluar	Rp (7.197.600)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	Rp (126.870.975)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp (1.286.317.614)
Jumlah	Rp (1.420.386.189)
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Des 2018	Rp 15.767.499.956
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2018	Rp 150.672.251
Nilai Buku Aset Tetap Lainnya per 31 Des 2018	Rp 15.616.827.705

Mutasi tambah:

- a. Saldo Awal berupa Barang Bercorak Kesenian sejumlah 186 unit senilai Rp747.761.502.
- b. Pembelian berupa Bahan Perpustakaan Tercetak sejumlah 7.556 unit senilai Rp152.335.519.
- c. Transfer Masuk berupa Bahan Perpustakaan Tercetak sejumlah 36 unit senilai Rp7.197.600.

Mutasi kurang:

- a. Transfer Keluar berupa Bahan Perpustakaan Tercetak sejumlah 36 unit senilai (Rp7.197.600)
- b. Reklasifikasi Keluar ke Persediaan berupa Bahan Perpustakaan Tercetak sejumlah 7.323 unit senilai (Rp126.870.975)
- c. Penghentian Aset dari Penggunaan berupa Bahan Perpustakaan Tercetak sejumlah 28.761 unit senilai (Rp1.286.317.614)

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.17 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp
52.066.821.704

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp52.066.821.704 dan Rp5.550.698.300 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Tabel 69. Mutasi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO	JENIS KDP	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Tanah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	PerMes	Rp -	Rp 1.791.638.737	Rp -424.671.285	Rp 1.366.967.452
3	Ged & Bang.	Rp 5.550.698.300	Rp 57.707.339.408	Rp -12.558.183.456	Rp 50.699.854.252
4	J I J	Rp -			Rp -
5	ATL	Rp -			Rp -
	JUMLAH	Rp 5.550.698.300	Rp 59.498.978.145	Rp -12.982.854.741	Rp 52.066.821.704

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(319.195.386.237)

C.18 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing Rp(319.195.386.237) dan Rp(258.973.096.145).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 70, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 70. Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Rincian	31 Desember 2018	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Setelah Penyusutan
1	Tanah	Rp 5.702.028.221.000	Rp -	Rp 5.702.028.221.000
2	Peralatan dan Mesin	Rp 349.987.715.606	Rp 252.521.666.523	Rp 97.466.049.083
3	Gedung dan Bangunan	Rp 914.120.177.720	Rp 55.454.392.707	Rp 858.665.785.013
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 38.318.120.157	Rp 11.068.654.756	Rp 27.249.465.401
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 15.767.499.956	Rp 150.672.251	Rp 15.616.827.705
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 52.066.821.704	Rp -	Rp 52.066.821.704
	Jumlah	Rp 7.072.288.556.143	Rp 319.195.386.237	Rp 6.753.093.169.906

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran.

Aset Tetap dalam Renovasi Rp0 **Aset Tetap dalam Renovasi**

Nilai perolehan Aset Tetap dalam Renovasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Tetap dalam Renovasi merupakan renovasi yang dilakukan terhadap aset tetap bukan milik satker. Mutasi terhadap Aset Tetap dalam Renovasi pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel 71.

Tabel 71. Mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo per 31 Desember 2017	Rp	-
Penambahan :		
Pembelian	Rp	113.190.000
Transfer Masuk	Rp	113.190.000
Jumlah	Rp	226.380.000
Pengurangan		
Transfer Keluar	Rp	(113.190.000)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(64.955.000)
Koreksi Pencatatan	Rp	(48.235.000)
Jumlah	Rp	(226.380.000)
Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Des 2018	Rp	-

Rincian lebih lanjut dari Aset Tetap dalam Renovasi disajikan dalam lampiran.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp1.453.618.819 **C.19 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi**

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.453.618.819 dan Rp1.351.942.144. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dapat dilihat pada Tabel 72.

Tabel 72. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR 31 Desember 2018

No	Nama	31 Desember 2018	Kualitas Piutang
1	Jolomebath	Rp 5.000.000	Macet
2	Hartadi Sutomo	Rp 63.900.000	Macet
3	Petrus P. S. Depari	Rp 1.282.124.273	Macet
4	Danu Nugroho	Rp 25.500.000	Macet
5	Ryandi Aditya	Rp 21.000.000	Macet
6	Setyo Utomo	Rp 34.654.546	Macet
7	Ilham Muhammad Fauzan	Rp 1.440.000	Lancar
8	Dwi Wulandari	Rp 20.000.000	Macet
Jumlah		Rp 1.453.618.819	

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
TP/TGR Jangka
Panjang
Rp1.452.186.019

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.452.186.019 dan Rp1.310.092.144. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR Jangka Panjang pada tanggal pelaporan dapat dilihat pada Tabel 73.

Tabel 73. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	Rp 1.440.000	0,50%	Rp 7.200
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp 1.452.178.819	100%	Rp 1.452.178.819
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp 1.453.618.819		Rp 1.452.186.019

Saldo Penyisihan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi/Piutang Jangka Panjang Lainnya yang disajikan adalah saldo penyisihan per 31 Desember 2018 atau sama dengan saldo Penyisihan Piutang pada LK Semester II Tahun 2018.

Aset Tak
Berwujud
Rp9.618.637.434

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp9.618.637.434 Rp9.613.161.972. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud berupa Pembelian Software sejumlah 2 unit senilai Rp5.475.462.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 74.

Tabel 74. Rincian Aset Tak Berwujud TA 2018

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Software	4.843.575.901
2	ATB Lainnya	4.775.061.533
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Des 2018		9.618.637.434
Akumulasi Amortisasi per 31 Des 2018		4.798.466.435
Jumlah Nilai Buku per 31 Des 2018		4.820.170.999

Aset Lain-Lain Rp
13.847.710.817

C.22 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp13.847.710.817 dan Rp14.836.529.031. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPPK serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo Aset Lain-lain terdiri dari:

1. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp13.349.721.917.
2. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp497.988.900.

Adapun uraian mutasi Aset Lain-lain dapat dilihat pada Tabel 75.

Tabel 75. Mutasi Nilai Aset Lain-lain

Saldo per 31 Desember 2017	Rp 14.836.529.031
Penambahan :	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp 9.826.673.817
Jurnal Balik SAKTI atas Aset Hilang yang Sudah Dihapuskan	Rp 16.600.000
Jumlah	Rp 9.843.273.817
Pengurangan	
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp (135.035.400)
Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan	Rp (10.697.056.631)
Jumlah	Rp (10.832.092.031)
Saldo Aset Lain-Lain per 31 Des 2018	Rp 13.847.710.817
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2018	Rp 11.465.649.071
Nilai Buku Aset Lain-Lain per 31 Des 2018	Rp 2.382.061.746

Mutasi tambah masing-masing dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 76. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT BESAR DARAT	1	34.332.650
2	ALAT BANTU	34	390.475.986
3	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4	624.735.372
4	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	4	4.980.000
5	ALAT UKUR	50	15.000.000
6	ALAT KANTOR	135	2.070.803.938
7	ALAT RUMAH TANGGA	971	1.194.744.900
8	ALAT STUDIO	207	223.821.330
9	ALAT KOMUNIKASI	37	68.524.777
10	PERALATAN PEMANCAR	2	3.180.000
11	ALAT KEDOKTERAN	4	1.896.000
12	KOMPUTER UNIT	310	3.229.151.240
13	PERALATAN KOMPUTER	106	607.160.010
14	PERALATAN OLAH RAGA	1	1.900.000
15	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	59.570.000
16	TUGU/TANDA BATAS	1	10.080.000
17	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	28.761	1.286.317.614
TOTAL		30.629	9.826.673.817

Tabel 77. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT KANTOR	2	(98.520.400)
2	KOMPUTER UNIT	2	(24.669.000)
3	PERALATAN KOMPUTER	4	(11.846.000)
TOTAL		8	(135.035.400)

Tabel 78. Pencatatan Barang yang Akan Dihapuskan

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT BANTU	4	(8.520.000)
2	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	6	(505.730.000)
3	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	(3.355.000)
4	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	(128.000)
5	ALAT UKUR	50	(15.000.000)
6	ALAT KANTOR	294	(1.444.108.196)
7	ALAT RUMAH TANGGA	867	(1.249.262.770)
8	ALAT STUDIO	239	(292.840.149)
9	ALAT KOMUNIKASI	38	(92.986.175)
10	PERALATAN PEMANCAR	1	(1.700.000)
11	KOMPUTER UNIT	295	(3.054.964.900)
12	PERALATAN KOMPUTER	145	(682.464.778)
13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4	(167.000.000)
14	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	40.212	(2.397.849.663)
15	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTU	2	(60.000)
16	ASET TAK BERWUJUD	26	(275.487.000)
17	ASET TAK BERWUJUD	1	(505.600.000)
TOTAL		42.187	(10.697.056.631)

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp16.264.115.506

C.23 Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp16.264.115.506 dan Rp15.648.180.922. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya dapat dilihat pada Tabel 79.

Tabel 79. Rincian Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

No	Rincian	31 Des 2018	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku Setelah Penyusutan
1	Aset Tak Berwujud	Rp 9.618.637.434	Rp 4.798.466.435	Rp 4.820.170.999
2	Aset Lain-Lain	Rp 13.847.710.817	Rp 11.465.649.071	Rp 2.382.061.746
	Jumlah	Rp 23.466.348.251	Rp 16.264.115.506	Rp 7.202.232.745

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp991.859.956

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp991.859.956 dan Rp2.850.274.811. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari kekurangan belanja pegawai yang belum dibayar; prestasi pekerjaan yang telah selesai namun belum dilakukan pembayaran baik yang berasal dari kontrak maupun perolehan barang/jasa; Utang kepada pihak ketiga BLU, dan Dana Pihak Ketiga berupa *Outstanding Cheque*. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan pada Tabel 80.

Tabel 80. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	% Naik (Turun)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	288.453.198	28.603.000	908,47
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	697.068.514	952.840.764	(26,84)
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga BLU	-	-	-
Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	-	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	6.338.244	15.198.464	(58,30)
Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	-	1.853.632.583	(100,00)
Jumlah	991.859.956	2.850.274.811	(65,20)

Uang Muka dari
KPPN Rp0

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp140.084.363

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp140.084.363 dan Rp22.221.569. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima/disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

Tabel 81. Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	51.062.633	22.221.569	129,79
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	1.000.000	-	-
Pendapatan Diterima di Muka BLU	88.021.730	-	-
Jumlah	140.084.363	22.221.569	530,40

Beban yang
Masih harus
Dibayar
Rp985.521.712

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp985.521.712 dan Rp981.443.764, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum dilakukan pembayaran berupa belanja pegawai yang belum dibayar; dan prestasi pekerjaan yang telah selesai namun belum dilakukan pembayaran baik yang berasal dari kontrak maupun perolehan barang/jasa. Perbandingan rincian saldo Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 82.

Tabel 82. Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Keterangan	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	288.453.198	28.603.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	697.068.514	952.840.764
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	985.521.712	981.443.764

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp0

C.28 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya di BPPK biasanya merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor dan Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor.

Utang Yang
Belum ditagihkan
Rp0

C.29 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan kewajiban entitas yang belum dipenuhi atas serah terima barang/jasa yang telah dilakukan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga.

**Tabel 83. Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan Per Satuan Kerja
31 Desember 2018**

No	Satuan Kerja	Nilai
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	Rp -
2	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN	Rp -
3	POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN	Rp -
4	BALAI DIKLAT KEUANGAN YOGYAKARTA	Rp -
5	BALAI DIKLAT KEUANGAN MALANG	Rp -
6	BALAI DIKLAT KEUANGAN MEDAN	Rp -
7	BALAI DIKLAT KEUANGAN PALEMBANG	Rp -
8	BALAI DIKLAT KEUANGAN MAKASSAR	Rp -
9	BALAI DIKLAT KEUANGAN BALIKPAPAN	Rp -
10	BALAI DIKLAT KEUANGAN CIMAH	Rp -
11	BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO	Rp -
12	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN - BPPK	Rp -
13	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK - BPPK	Rp -
14	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI - BPPK	Rp -
15	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM	Rp -
16	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - BPPK	Rp -
17	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN -	Rp -
18	BALAI DIKLAT KEUANGAN PEKANBARU	Rp -
19	BALAI DIKLAT KEUANGAN PONTIANAK	Rp -
20	BALAI DIKLAT KEUANGAN DENPASAR	Rp -
	TOTAL	Rp -

Ekuitas
Rp6.864.286.856.450

C.30 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.864.286.856.450 dan Rp6.822.257.127.238. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas berupa selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBPNP
Rp46.116.194.604

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp46.116.194.604 dan Rp47.637.372.009. Perbandingan rincian PNBP 31 Desember TA 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 84.

**Tabel 84. Perbandingan Rincian PNBP
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan PNBPNP Lainnya			
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Penjualan Lainnya	-	11.180.000	(100,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	190.483.743	306.121.010	(37,78)
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	-	1.317.000.000	(100,00)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.958	1.920.030	(99,90)
Pendapatan Pendidikan Lainnya	393.288.000	220.400.000	78,44
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	232.583.119	162.855.069	42,82
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	41.800.000	-	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	1.570.000.000	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	34.482.770.009	36.431.801.962	(5,35)
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-	755.725.756	(100,00)
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2.478.425.000	2.118.161.750	17,01
Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	2.278.275.000	2.434.150.000	(6,40)
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	4.002.272.359	3.789.132.822	5,63
Pendapatan Lain-lain BLU	248.885.370	-	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	180.784.346	-	-
Jumlah Pendapatan Jasa	46.099.568.904	47.548.448.399	(3,05)
Pendapatan Lain-Lain			
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	423.610	(100,00)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	16.625.700	88.500.000	(81,21)
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	16.625.700	88.923.610	(81,30)
Jumlah	46.116.194.604	47.637.372.009	(3,19)

Beban Pegawai
Rp84.620.218.457

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp84.620.218.457 dan Rp80.661.681.578. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan aturan undang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas

pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**Tabel 85. Perbandingan Rincian Beban Pegawai
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	58.156.235.353	55.928.499.010	3,98
Beban Pembulatan Gaji PNS	853.345	801.291	6,50
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	4.176.136.844	3.744.472.911	11,53
Beban Tunj. Anak PNS	1.208.296.378	1.053.529.486	14,69
Beban Tunj. Struktural PNS	2.013.750.000	1.935.355.000	4,05
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.936.075.000	2.246.510.000	30,69
Beban Tunj. PPh PNS	148.825.203	140.439.182	5,97
Beban Tunj. Beras PNS	3.105.204.960	2.983.554.180	4,08
Beban Uang Makan PNS	9.201.058.000	8.144.956.850	12,97
Beban Tunjangan Umum PNS	2.268.405.000	2.021.175.000	12,23
Beban Uang Lembur	238.023.000	502.572.500	(52,64)
Beban Gaji dan Tunjangan	1.167.355.374	1.959.816.168	(40,44)
Jumlah	84.620.218.457	80.661.681.578	4,91

*Beban Persediaan
Rp27.913.177.233*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp27.913.177.233 dan Rp15.244.431.653.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 86.

**Tabel 86. Perbandingan Rincian Beban Persediaan
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Persediaan konsumsi	27.079.049.778	14.866.208.844	82,15
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	570.000	(100,00)
Beban Persediaan bahan baku	2.258.200	15.553.565	(85,48)
Beban Persediaan Lainnya	831.869.255	362.099.244	129,74
Jumlah Beban Persediaan	27.913.177.233	15.244.431.653	83,10

*Beban Barang dan
Jasa
Rp364.073.888.267*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan jasa 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp364.073.888.267 dan Rp392.050.969.497.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas,

serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 87.

**Tabel 87. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	29.645.730.557	24.090.553.148	23,06
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	92.794.332	430.564.806	(78,45)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	754.530.599	545.607.502	38,29
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	4.339.837.000	4.142.290.000	4,77
Beban Barang Operasional Lainnya	2.857.018.137	2.366.853.148	20,71
Beban Bahan	62.875.136.639	65.423.606.897	(3,90)
Beban Honor Output Kegiatan	2.247.678.300	2.694.017.000	(16,57)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	152.911.669.551	190.667.207.652	(19,80)
Beban Langganan Listrik	12.796.649.007	12.213.197.591	4,78
Beban Langganan Telepon	206.638.353	284.260.394	(27,31)
Beban Langganan Air	737.640.395	418.670.206	76,19
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	5.700.000	(100,00)
Beban Jasa Konsultan	69.960.000	93.060.000	(24,82)
Beban Sewa	5.394.266.099	7.452.459.015	(27,62)
Beban Jasa Profesi	43.448.396.629	10.910.735.128	298,22
Beban Jasa Lainnya	20.315.961.238	44.369.417.546	(54,21)
Beban Barang	2.840.838.300	10.572.003.443	(73,13)
Beban Jasa	21.849.392.230	14.385.436.462	51,89
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	260.007.025	900.642.659	(71,13)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	429.743.876	38.948.900	1.003,35
Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	45.738.000	(100,00)
Jumlah	364.073.888.267	392.050.969.497	(7,14)

*Beban
Pemeliharaan
Rp20.357.799.687*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp20.357.799.687 dan Rp15.775.340.892. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 88.

**Tabel 88. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.873.792.101	8.079.387.534	46,96
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.339.083.746	5.183.304.402	22,30
Beban Pemeliharaan Jaringan	2.658.000	8.356.500	(68,19)
Beban Pemeliharaan Lainnya	521.000	12.984.000	(95,99)
Beban Pemeliharaan	1.102.681.372	1.464.411.529	(24,70)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.028.793.637	1.015.054.842	1,35
Beban Persediaan suku cadang	10.269.831	11.842.085	(13,28)
Jumlah	20.357.799.687	15.775.340.892	29,05

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp84.788.853.808*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp84.788.853.808 dan Rp61.228.673.878. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 89.

**Tabel 89. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

Uraian Jenis Beban	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	59.125.813.366	40.469.139.208	46,10
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.112.970.953	2.833.419.059	9,87
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	703.877.210	2.193.019.957	(67,90)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13.361.615.733	5.967.155.133	123,92
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	4.419.605.671	4.573.379.274	(3,36)
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	415.513.594	1.763.004.580	(76,43)
Beban Perjalanan	3.649.457.281	3.429.556.667	6,41
Jumlah	84.788.853.808	61.228.673.878	38,48

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk

uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp69.934.384.679*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp69.934.384.679 dan Rp60.593.467.337. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Amortisasi mulai diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan 2016. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 90.

Tabel 90. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	34.199.350.214	27.832.461.476	22,88
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.428.298.653	28.268.160.457	14,72
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.625.328.717	2.878.779.938	(43,54)
Beban Penyusutan Irigasi	554.069.049	597.789.698	(7,31)
Beban Penyusutan Jaringan	990.418.707	845.826.487	17,09
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	31.275.200	42.587.325	(26,56)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	89.931.331	(100,00)
Jumlah Penyusutan	69.828.740.540	60.555.536.712	15,31
Beban Amortisasi Software	22.658.541	37.930.625	(40,26)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	82.985.598	-	-
Jumlah Amortisasi	105.644.139	37.930.625	178,52
	69.934.384.679	60.593.467.337	15,42

*Beban Penyisihan
Piutang Tak tertagih
Rp274.686.914*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp274.686.914 dan Rp127.787.333. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 91.

Tabel 91. Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNBPNP	(17.121.197)	121.817.992	(114,05)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	4.495.436	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	43.800	-	-
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	145.175.000	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	142.093.875	5.969.341	2.280,39
	274.686.914	127.787.333	114,96

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp576.447.163

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 92.

Tabel 92. Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Naik (Turun) %
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	(2.392.228.077)	468.115.496	(611,03)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	407.913.308	175.134.000	132,91
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	142.300.777	490.753.999	(71,00)
Kerugian Pelepasan Aset	2.942.442.162	197.772.503	1.387,79
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.968.675.240	409.174.667	625,53
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	-	91.160.000	(100,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	46.250.000	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	25.040.639	31.924.857	(21,56)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.167.029.721	175.873.916	1.132,15
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	172.937.112	19.693.675	778,14
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	4.123.101	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	2.215.582.455	637.091.744	247,77
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.468.956.668	536.507.691	173,80
Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	193.331.120	10.061.834	1.821,43
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	576.447.163	877.290.163	(34,29)

Pos-Pos Luar Biasa **D.12 POS-POS LUAR BIASA**
Rp0

Pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tidak terdapat Pos Defisit dari Pos Luar Biasa di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp6.822.257.127.238

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.822.257.127.238 dan Rp2.144.570.112.820.

Defisit LO
Rp(605.270.367.278)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp(605.270.367.278) dan Rp(577.167.689.996). Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan Akuntansi
Rp0

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Tidak terdapat Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai Persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian Persediaan. Koreksi nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Nilai Persediaan disebabkan oleh penyesuaian terhadap hasil opname persediaan pada akhir periode pelaporan.

Selisih Revaluasi
Aset Rp0

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang Aset Tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp4.642.496.469.899.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp1.722.228.916

E.4.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah transaksi yang mengoreksi Aset namun bukan diakibatkan revaluasi nilai, misalnya koreksi aset atas temuan auditor, reklasifikasi antar Aset yang menyebabkan perubahan penyusutan karena perbedaan masa manfaat Aset, dan koreksi atas kesalahan jurnal kirim modul Aset ke GL Pelaporan. Koreksi Penilaian Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar minus Rp1.722.228.916 dan Rp1.228.163.490. Rincian transaksi Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per tanggal 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 93.

Tabel 93. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2018

Satker	Uraian	Jumlah
BDPim Magelang	Kesalahan pencatatan KDP	(150.000)
PKN STAN	Aplikasi secara otomatis melakukan penyusutan sebesar 1% dari nilai koreksian. Selain itu terdapat koreksi nilai di debit sebesar Rp 1 pada bulan September 2018 sebagai akibat pembulatan	(360.442.550)
BDK Balikpapan	Jurnal manual karena terdapat selisih antara nilai aset dengan SP2D (pembulatan)	2
Pusdiklat Pajak	Nilai penyusutan barang design and build interior asrama diklat yang direklas dengan tanggal perolehan 31 Desember 2017 hanya 1 kali (10%), seharusnya 2 kali penyusutan.	(1.361.636.368)
		(1.722.228.916)

Lain-lain
Rp(37.567.448)

E.4.5 Lain-lain

Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar minus Rp37.567.448 dan Rp59.997.327. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas Pendapatan, koreksi atas Beban, koreksi atas Hibah, koreksi atas Piutang, dan koreksi atas Kewajiban. Koreksi Lainnya di BPPK per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 93.

Tabel 94. Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2018

Satker	Uraian	Jumlah
PKN STAN	Koreksi atas kurang catat saldo Uang Muka Belanja Pegawai	2.193.218
Setban	Koreksi atas pendapatan sewa ATM di Loby Barat Gedung H	1.897.500
PKN STAN	Koreksi atas pendapatan sewa ATM Mandiri di Gedung P untuk periode sewa Tgl 24 Maret 2017 s.d 23 Maret 2020 (sesuai Perjanjian No.PRJ-6/PKN/2017 Tgl 5 Juni 2017 sebesar Rp26.780.250)-Koreksi Audit BPK	(20.085.187)
PKN STAN	Koreksi atas pendapatan sewa ATM Mandiri di Pos Jaga untuk periode sewa Tgl 5 Juni 2017 s.d 4 Juni 2020 (sesuai Perjanjian No.PRJ-9/PKN/2017 Tgl 5 Juni 2017 sebesar Rp26.780.250)-Koreksi Audit BPK	(21.572.979)
		(37.567.448)

Transaksi Antar
Entitas
Rp645.615.435.022

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp645.615.435.022 dan Rp611.070.073.698. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN. Rincian transaksi antar-entitas per tanggal 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 94.

Tabel 95. Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018

Uraian	Jumlah
Ditagihkan ke Entitas Lain	652.451.794.889
Diterima dari Entitas Lain	(6.836.359.867)
Transfer Keluar	(11.606.247.530)
Transfer Masuk	11.606.247.530
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	-
	645.615.435.022

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp6.836.359.867 sedangkan DKEL sebesar Rp652.451.794.889.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari

satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp11.606.247.530. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp11.606.247.530. Rincian Transfer sampai dengan 31 Desember tahun 2018 disajikan pada Lampiran.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung entitas dalam bentuk kas, barang, maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp6.864.286.856.450

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.864.286.856.450 dan Rp6.822.257.127.238.